

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 186 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS**  
**OPERASIONAL DAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS**  
**OPERASIONAL KANTOR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa adanya pembaruan atas kendaraan dinas operasional Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan kendaraan dinas operasional kantor pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penghentian dan pemindahtanganan melalui lelang atas kendaraan dinas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah habis masa manfaatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penanggung Jawab Alat Angkutan Darat Bermotor

Dinas Operasional Jabatan dan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR OPERASIONAL KANTOR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan (selanjutnya disebut dengan Kendaraan Dinas Jabatan) dan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor (selanjutnya disebut dengan Kendaraan Dinas Operasional) sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan dengan ketentuan:

- a. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional dinas maka pemeliharaan

menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- b. Kerusakan kendaraan dinas yang disebabkan karena penggunaan di luar kepentingan dinas maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNG  
JAWAB ALAT ANGKUTAN DARAT  
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL  
JABATAN DAN ALAT ANGKUTAN DARAT  
BERMOTOR OPERASIONAL KANTOR PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 186 Tahun 2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

**PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DAN ALAT ANGKUTAN DARAT  
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KANTOR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
1	Kepala	Kepala	Roda 4	Toyota Camry	B 1421 SQA
2	Sekretaris Utama	Sekretaris Utama	Roda 4	Toyota Camry	B 1422 SQA

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
3	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Roda 4	Toyota Camry	B 1423 SQA
4	Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Roda 4	Toyota Camry	B 1424 SQA
5	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Roda 4	Toyota Camry	B 1426 SQA
6	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Roda 4	Toyota Camry	B 1427 SQA
7	Inspektur	Inspektorat	Roda 4	Toyota Fortuner (Sewa)	B 2072 SJB
8	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 [Sewa]	B 1124 UJZ

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
9	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 [Sewa]	B 1114 UJZ
10	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Roda 4	Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 [Sewa]	B 1315 UJZ
11	Direktur Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pengadaan	Roda 4	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G AT/DSL [Sewa]	B 1303 UJZ
12	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Toyota Fortuner (Sewa)	B 2179 SJB
13	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Toyota New Innova 2.4 Venturer AT DSL [Sewa]	B 2447 UZR

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
14	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Roda 4	Toyota Fortuner (Sewa)	B 2109 SJB
15	Direktur Sertifikasi Profesi	Direktorat Sertifikasi Profesi	Roda 4	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G AT/DSL [Sewa]	B 1277 UJZ
16	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Roda 4	Toyota New Innova 2.4 Venturer AT DSL [Sewa]	B 2945 UZP
17	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Roda 4	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G AT/DSL [Sewa]	B 1046 UJZ
18	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Roda 4	Toyota New Innova 2.4 Venturer AT DSL [Sewa]	B 2008 UZP



NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
19	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Toyota Fortuner (Sewa)	B 2143 SJB
20	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Roda 4	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G AT/DSL [Sewa]	B 1281 UJZ
21	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Roda 4	Toyota Fortuner (Sewa)	B 2110 SJB
22	Kepala Biro Humas, Sistem Informasi, dan Umum	Biro Humas, Sistem Informasi, dan Umum	Roda 4	Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 [Sewa]	B 1355 UJZ
23	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Toyota/Innova	B 1955 SQP

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
24	Direktur Pengembangan Strategi & Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi & Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Toyota/Innova	B 1734 SQN
25	Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Roda 4	Toyota/Innova	B 1735 SQN
26	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Roda 4	Nissan/ Evalia	B 1901 SQO
27	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Toyota/Innova	B 1953 SQP
28	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Toyota/Innova	B 1732 SQN
29	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Roda 4	Toyota/Innova	B 1736 SQN

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
30	Direktur Sertifikasi Profesi	Direktorat Sertifikasi Profesi	Roda 4	Toyota/Innova	B 1956 SQP
31	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Roda 4	Toyota/Innova	B 1954 SQP
32	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Roda 4	Toyota/Innova	B 1733 SQN
33	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Nissan/ Evalia	B 1951 SQO
34	Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Roda 4	Nissan/ Evalia	B 1900 SQO
35	Inspektur	Inspektorat	Roda 4	Toyota/Innova	B 1960 SQP
36	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Roda 4	Toyota/Innova	B 1963 SQP

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
37	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Roda 4	Toyota/Innova	B 1957 SQP
38	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Roda 4	Toyota/Innova	B 1959 SQP
39	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Protokol Kepala)	Roda 4	Toyota/Innova	B 1962 SQP
40	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Sekretaris Utama)	Roda 4	Toyota/Innova	B 1958 SQP
41	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Kuasa Pengguna Barang)	Roda 4	Toyota/Innova	B 1961 SQP



NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
42	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Jemputan)	Roda 4	Mitsubishi L300	B 1378 SQO
43	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Jemputan)	Roda 4	Mitsubishi L300	B 1379 SQO
44	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Jemputan)	Roda 4	Nissan Evalia	B 1902 SQO
45	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Jemputan)	Roda 4	KIA Travello	B 7670 QK

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
46	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Jemputan)	Roda 4	KIA Travello	B 7672 QK
47	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 4	Mitsubishi Expander Exceed A/T VIN 2019 [SEWA]	B 2214 SIC
48	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Yamaha Mio	B 6528 SQV
49	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Yamaha Mio	B 6527 SQV

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
50	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Yamaha Mio	B 6526 SQV
51	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Yamaha Mio	B 6525 SQV
52	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Yamaha Mio	B 6524 SQV
53	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Honda Supra X	B 6976 SQR
54	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Honda Supra X	B 6975 SQR

NO.	PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI (FUNGSI)	KENDARAAN		
			JENIS	MERK/TYPE	NO POLISI
55	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (Operasional Kantor)	Roda 2	Honda Supra X	B 6974 SQR

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS